



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Komplek Balaikota Lantai 3 Ex. Lapangan Poliko
Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh Telp. (0752)92052

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2027

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
KODE KEGIATAN	:	5. 02. 02. 2.01. 07
ANALISIS SITUASI	:	1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) : a. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD. b. Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan. c. Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.
	:	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : a. Akses : 1. Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penganggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh. 2. Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender. 3. Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh. b. Penyebab Internal : 1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius. 2. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh.

		c. Penyebab Eksternal : Kurangnya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah mengenai responsif gender.	
RENCANA TINDAK		Kegiatan :	
		Tujuan	Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
		Aktivitas	1. Menghimpun data sesuai dengan KUA dan PPAS. 2. Verifikasi RKA SKPD. 3. Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD (Banggar) .
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 1.401.137.587,- SDM : TAPD dengan anggota sebanyak 65 orang. Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu
ALOKASI SUMBER DAYA	:	Jumlah Anggaran Kegiatan :	Belanja untuk Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2027 sebesar Rp. 1.401.137.587,-
		SDM	TAPD dengan anggota sebanyak 65 orang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD.
		Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer
OUTCOMES		Rumusan Kinerja: 1. Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.	

		2. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Indikator kinerja : (1)OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. (2)Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. (3)Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh. (4)Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). (5)Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD. (6)Penjabaran APBD Kota Payakumbuh di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPA SKPD.
--	--	--

Payakumbuh, Maret 2026
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 19730319 199308 1 001